

Aksi Damai Diam di depan Istana Presiden – Kamis ke- 88  
**JSKK** Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM  
Jl. Bonang IA, Menteng, Jakarta Pusat 12870 Telp. 021-31931181

=====

Nomor : 59 /Surat Terbuka\_JSKK/X/2008

Jakarta, 13 November 2008

Hal : **10 Tahun Semanggi Satu :**  
**Surat Berkas Perkara Masih Digantung Kejaksanaan**

Kepada Yth,  
Presiden Republik Indonesia  
**Bapak Susilo Bambang Yudhoyono**  
Jakarta

Sepuluh tahun sudah kita berproses dalam masa Reformasi, bukanlah perjalanan singkat untuk melakukan sebuah perubahan untuk memperbaiki atau bahkan memperoleh dinamika demokrasi positif Indonesia. Akan tetapi masih ingatkah kita semua tentang bentuk dan semangat perjuangan yang dicita-citakan oleh gerakan kaum muda Indonesia yang telah menjadi martir untuk melakukan perubahan kehidupan sipil berdemokrasi? Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kami hormati, sungguh kami sangat memahami semangat dan arti Reformasi yang dicita-citakan oleh kaum muda, dimana mahasiswa dan masyarakat sipil Indonesia berjuang untuk mewujudkannya, melepaskan segenap belenggu kekangan otoritarianisme Orde Baru. Perjuangan sebuah ideologi pembebasan yang mengorbankan waktu, airmata, keringat, hingga darah dan nyawa hanya untuk mendapatkan kehidupan bersosial dan politik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan moralitas Hak Asasi Manusia telah dilakukan oleh mereka yang amat merindukan perubahan sosial.

Akan tetapi kekangan itu masih kami rasakan. Kaum muda yang bergerak mewujudkan perubahan harus berhadapan layaknya pejuang kemerdekaan yang ingin merebut hak kemerdekaannya dari tangan penjajah. Gerakan Mahasiswa 1998 yang juga bagian dari kaum muda yang ingin bergegas merebut 'kemerdekaannya' harus berhadapan dengan Negeranya sendiri, aparatnya sendiri, yang seharusnya memberikan perlindungan sesuai dengan amanat hak dan kewajiban yang terkandung dalam unsur-unsur kewarganegaraan Indonesia.

Peristiwa Pelanggaran HAM Semanggi I, yang telah menghilangkan nyawa anak-anak kami, telah menciptakan sebuah ingatan ironi yang masih membekas hingga kini. Anak-anak kami yang tewas di tangan Negara telah merelakan nyawanya hanya untuk mendapatkan kebebasan berpikir. Atau ingatkah Bapak Presiden dengan anak-anak yang kami cintai, yang masih hilang hingga kini? Bagaimana dengan nasib mereka? Komnas HAM telah menyatakan bahwa Peristiwa Semanggi I dan banyak Peristiwa kekerasan menjelang detik-detik Reformasi sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM yang sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh Negara.

Namun Bapak Presiden, Negara masih mangkir dan mengabaikan semua berkas penyelidikan tersebut. Kejaksanaan Agung hanya menjadi kantor transit menumpuknya semua berkas penyelidikan pelanggaran berat HAM yang terjadi pada medio 1998. Dimanakah rasa keadilan Negara? Dimanakah kami harus meminta agar hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya di Indonesia? Kami menuntut hak dari anak-anak kami, yang telah menjadi korban kemanusiaan dalam sebuah transisi kehidupan berdemokrasi Indonesia. Kami menuntut segera terbentuknya Pengadilan HAM adhoc untuk menuntaskan kasus ini, karena telah menjadi hak utuh

dari warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan bentuk keadilan dan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

Bapak presiden,

Tentu akan menjadi sebuah kebaikan yang luhur jika dengan kapasitas sebagai pimpinan tertinggi Negara, mampu memenuhi amanat serta mewujudkan terciptanya keadilan yang beradabatas bentuk kemanusiaan bagi semua warga negara, termasuk di dalamnya korban dan keluarga korban. Kami selalu berharap serta meminta langkah nyata dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung dan DPR melalui langkah-langkah yudisial dan politik, agar benar-benar menyelesaikan kasus ini secara tuntas, agar cita-cita mulia dari Reformasi tidak mengalami hambatan, agar generasi muda Indonesia bisa melanjutkan asa dari apa yang telah diperjuangkan oleh kaum muda 1998.

Jakarta, 13 November 2008

Hormat kami,

**JSKK**

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM